

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan bisa dikatakan sebagai suatu proses pengembangan (negara, kota, bisnis, masyarakat, dan lain-lain.) yang bertujuan untuk "memenuhi kepentingan pada masa ini tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pada generasi mendatang" (mengacu pada pernyataan *Brundtland Report* dari PBB, 1987). Konsep pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan hidup, melainkan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *Sustainable Development*. Faktor yang perlu diatasi untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ialah bagaimana cara untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan keadilan sosial dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan terakhir dari PBB mengenai KTT Dunia tahun 2005, yang menjelaskan mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang mana mencakup tiga komponen utama: lingkungan, sosial, serta ekonomi, yang menyokong serta menguatkan antara satu sama lain. Dalam pembangunan berkelanjutan memiliki empat pilar pembangunan: pilar pembangunan sosial (tujuan 1,2,3,4, dan 5), pilar pembangunan ekonomi (tujuan 7,8,9,10, 17), pilar pembangunan lingkungan (tujuan 6,11,12,13,14,15), beserta pilar pembangunan hukum dan tata kelola (tujuan 16). (Nurfindarti, 2019).

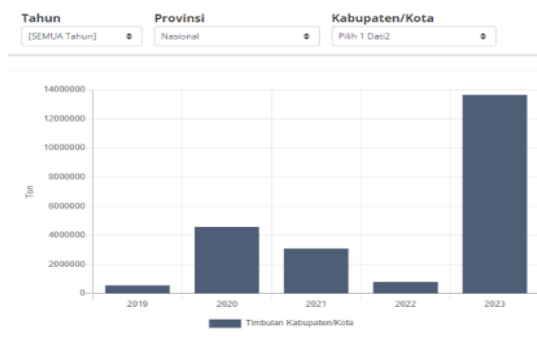
Pada pembangunan berkelanjutan permasalahan mengenai lingkungan memang tidak masuk secara spesifik kedalam 17 pilar di atas, akan tetapi

permasalahan lingkungan memiliki keterkaitan terhadap beberapa aspek dalam pilar pembangunan berkelanjutan. Seperti contoh keterkaitan dengan pilar ketiga yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, Pilar keenam, yang berarti air bersih dan sanitasi yang layak, pilar kesebelas yaitu kota yang berkelanjutan, dan Pilar kedua belas yaitu yang berarti produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, dari semua pilar tersebut memiliki keterkaitan dengan lingkungan, yang mana setiap pilar tersebut melibatkan kesehatan masyarakatnya, produksi yang bertanggung jawab, dan permasalahan lingkungan seringkali terjadi di kota-kota besar biasanya disebabkan oleh sampah. Permasalahan mengenai sampah menjadi masalah yang mencakup berbagai sektor dan berdampak pada ketiga komponen pembangunan berkelanjutan.

Pada era modern seperti saat ini, yang mana pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang dilakukan oleh manusia telah berkembang pesat di seluruh dunia dan menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam produksi sampah dan degradasi lingkungan. Dengan terjadinya permasalahan tersebut, dalam pembangunan berkelanjutan ada salah satu aspek penting untuk memaksimalkan pembangunan berkelanjutan yaitu mengelola sampah secara efektif serta berkelanjutan.

Satu di antara masalah lingkungan yang semakin penting ialah pengelolaan sampah. Di seluruh dunia, isu mengenai sampah secara global diprediksi akan terus mengalami peningkatan yang awalnya 2,01 miliar ton (2016) menjadi 3,4 miliar ton (2050), jika tidak ada pencegahan yang dilakukan (Kaza et al., 2018). Hal ini menjadikan pengelolaan sampah adalah suatu layanan penting yang harus

disediakan di perkotaan khususnya di negara yang sedang berkembang dengan pendapatan rendah hingga menengah (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012). Permasalahan mengenai sampah pada saat ini juga sedang dihadapi oleh Indonesia. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang cepat, dan pola konsumsi yang meningkat telah menyebabkan peningkatan secara signifikan dalam pembuangan sampah. Akibatnya, permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah, seperti pencemaran lingkungan, krisis sampah, kerusakan ekosistem, dan timbulan sampah yang semakin meningkat. Untuk mengetahui timbulan sampah di Indonesia dapat dilihat dari data tonase timbulan sampah di Indonesia setiap tahunnya, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 Data tonase sampah di Indonesia
 Sumber: sipsn.menhk.go.id



Gambar 1.2 Data komposisi sampah berdasarkan jenis di Indonesia
 Sumber: sipsn.menhk.go.id



Gambar 1.3 Data komposisi sampah berdasarkan sumber di Indonesia
Sumber: sipsn.menhk.go.id

Melansir data dari sipsn.menhk.go.id tahun 2023, jumlah timbulan sampah di Indonesia sudah mencapai 13,653,648.03-ton per tahun yang mana sampah organik masih mendominasi timbulan sampah, khususnya sampah sisa makanan yang menyumbang sebesar 39.62% pada timbulan sampah di Indonesia. Serta sampah dari rumah tangga menyumbang sebesar 44.69% pada tahun 2023.

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengatasi permasalahan sampah yang sudah ditetapkan pada UU No. 18 Tahun 2008 mengatur pengelolaan sampah. Dalam UU No. 18 Tahun 2008 memaparkan bahwa karena pengurangan dan penanganan sampah adalah bagian dari aktivitas sistematis, menyeluruh, serta berkesinambungan di mana dikenal sebagai pengelolaan sampah. Pemerintah Indonesia beserta pemerintah daerah turut mengambil tanggung jawab guna memastikan bahwa, seturut akan tujuan UU dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah dijalankan dengan cara baik dan berwawasan lingkungan. Akan tetapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakannya tentu akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, seperti implementasi kebijakan, kesadaran masyarakat, dan sumber daya terbatas masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menghadapi permasalahan sampah yang memerlukan perlakuan khusus melalui kerjasama dari berbagai pihak untuk

menanggulangi timbulan sampah yang diproduksi oleh semua kota dan kabupaten di Jawa Barat. Menurut data dari opendata.jabarprov.go.id menyatakan bahwa saat ini Dengan total 4,05 juta ton sampah pada tahun 2022, Jawa Barat berada di urutan kedua di Indonesia dalam jumlah timbulan sampah. Jumlah timbulan sampah yang terus meningkat ini merupakan dampak dari populasi perkotaan yang juga terus meningkat.

Sampah menjadi suatu masalah yang tidak pernah lepas dari permasalahan di setiap negara maupun kota. Dengan banyaknya aktivitas manusia, produksi sampah meningkat, masih rendahnya kesadaran masyarakat dan dukungan untuk pengelolaan sampah, serta minimnya infrastruktur dan fasilitas sampah yang tidak memadai, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Untuk menangani masalah sampah diperlukan pengelolaan sampah berupa pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan bahan sampah merupakan layanan publik penting yang membantu melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah telah menjadi masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat yang hidup diperkotaan. Pengelolaan sampah merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah, perusahaan, dan individu. Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk menekan jumlah sampah yang dihasilkan, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali bahan bila memungkinkan, dan membuang limbah secara aman yang tidak mungkin didaur ulang atau digunakan kembali. Pengelolaan sampah wajib dilaksanakan dengan menyeluruh serta terpadu melalui sumber sampah hingga pada pengolahan akhir sampah. Hal ini harus dilaksanakan mengingat sampah sekarang

menjadi masalah nasional, jadi perlu ada langkah mengelola sampah secara efektif serta berkesinambungan mulai dari hulu sampai pada hilir, diharapkan dapat mengurangi efek negatif dari pembuangan sampah terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif dari pengelolaan sampah yang buruk dapat berakibat fatal pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan yang memiliki keterkaitan terhadap Sampah pasti ada di banyak tempat di Indonesia, dan Kota Bekasi adalah salah satunya. Pada penelitian ini memilih Kota Bekasi sebagai lokus penelitian dikarenakan Kota Bekasi seringkali menghadapi permasalahan terkait timbulan sampah dan pengelolaan sampah yang belum optimal, selain itu juga Kota Bekasi sebagai salah satu kota penyangga ibukota yang seharusnya memiliki pengelolaan sampah yang lebih baik dan juga dengan pertumbuhan ekonomi serta urbanisasi yang pesat seharusnya Kota Bekasi mampu melakukan pengelolaan sampah secara optimal.

Di Kota Bekasi masalah sampah masih menjadi isu yang terus dihadapi oleh hampir semua wilayah di Kota Bekasi. Masalah yang terjadi dalam isu tersebut lebih terfokus pada teknik pengelolaan sampah dan manajemen pengolahan sampah. Masalah sampah yang terjadi di Kota Bekasi sudah menjadi masalah yang umum dan belum juga terselesaikan. Selain itu timbulan sampah yang dihasilkan sebagian besar karena kurangnya lahan guna dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) pada wilayah perkotaan. Saat ini Kota Bekasi sudah memiliki Tempat pembuangan sampah (TPA) Bantar Gebang dan Sumur Batu, lokasi TPA tersebut masih berfungsi sampai saat ini, akan tetapi di TPA Bantar Gebang yang lokasinya

berada di Kota Bekasi sudah terlalu meningkat tinggi sampah dan saat ini sudah menjadi milik DKI Jakarta. Dari kedua TPA yang tersedia di Kota Bekasi, keduanya sudah mengalami kelebihan muatan daripada yang sebagaimana umumnya dan hanya TPA Sumur Batu yang masih aktif untuk menampung sampah untuk Kota Bekasi. TPA Sumur Batu Kota Bekasi saat ini sudah kelebihan kapasitas, hingga tidak semua sampah yang diproduksi harian dapat dibuat menuju TPA Sumur Batu. Selain itu dari total timbulan sampah di Kota Bekasi sebanyak 1800-ton sampah per hari serta hanya 1000-1200-ton yang dapat terangkut masuk TPA (Wawancara dengan Sub Koordinator sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi), kemudian luas TPA Sumur Batu hanya 22 hektar yang memiliki 6 zona penampungan sampah dan hal tersebut masih dinilai kurang luas, karena besarnya timbulan sampah di Kota Bekasi yang termasuk sebagai kota penyangga ibukota belum dapat menampung semua sampah yang dibuat oleh masyarakat setiap hari, dan juga apabila dibandingkan dengan TPA Bantar Gebang yang memiliki luas TPA sebesar 165 hektar. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui sampah yang tidak dapat diangkut karena TPA Sumur Batu tidak dapat menampung semua sampah Kota Bekasi memiliki potensi tinggi yang menyebabkan satu di antara sebab timbulnya TPS liar di Kota Bekasi.



Gambar 1.4 Kondisi TPA Sumur Batu
Sumber: Observasi Lapangan (2024)

Permasalahan sampah di Kota Bekasi bertambah menjadi permasalahan yang rumit dikarenakan meningkatnya jumlah masyarakat di Kota Bekasi setiap tahunnya, tentunya dengan masyarakat yang mengalami peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan juga ikut meningkat. Ini bisa ditinjau dengan data pertumbuhan penduduk Kota Bekasi sebagai berikut:



Gambar 1.5 Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi 2019-2023
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Mengacu pada data di atas berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tahun 2019 sampai pada tahun 2023 mempertunjukkan bahwa kuantitas penduduk Kota Bekasi kerap mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Dari peningkatan ini juga yang menyebabkan sampah yang dihasilkan Kota Bekasi terjadi peningkatan.

Faktor selanjutnya yang menambah persoalan mengenai sampah di Kota Bekasi yang akan dipaparkan pada penelitian ini yaitu merupakan jumlah timbulan sampah di Kota Bekasi masih tinggi dan masih jauh dari target penanganan dan pengurangan yang sudah ditentukan. Data tentang timbulan, pengurangan, penanganan, dan pengelolaan sampah berikut, berkaitan dengan hal tersebut di Kota Bekasi, yaitu:

Tabel 1.1 Data pengelolaan sampah di Kota Bekasi tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Jumlah timbulan sampah (ton/tahun)	867,236.75	668,179.00	637,778.59
Persentase timbulan sampah	33,44	-22,95	-4,55
Jumlah pengurangan sampah (ton/tahun)	3,740.40	29,412.83	13,252.83
Target pengurangan sampah	24.00 %	26.00 %	27.00 %
Persentase pengurangan sampah	0,43	4,40	2,08
Jumlah sampah yang tertangani (ton/tahun)	438,190.53	365,091.25	365,091.76
Target penanganan sampah	74,00 %	73,00 %	72,00 %
Persentase penanganan sampah	50,53	54,64	57,24
Jumlah sampah yang dikelola	441,930.93	394,504.08	378,354.59
Persentase sampah yang dikelola	50,96	59,04	59,32
Jumlah sampah yang tidak dikelola	425,305.82	273,674.92	25,942.40
Persentase sampah yang tidak dikelola	49,04	40,96	40,68

Sumber: DLH Kota Bekasi (2021-2023). Data diolah (2024)

Menurut data dari DLH Kota Bekasi di atas, timbulan sampah yang terproduksi pada tahun 2021-2023 terjadi penurunan dalam timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Bekasi. Namun jumlah timbulan sampah tidak sepenuhnya dapat dikurangi. Misalnya, pada tahun 2022 timbulan sampah yang berhasil dikurangi sebesar 4,04% atau 29,412.83 ton. Artinya jumlah sampah yang berhasil dikurangi belum memenuhi target pengurangan sampah yaitu 26% pada tahun 2022. Selain itu pada tahun 2023 jumlah sampah yang tertangani 57,24% atau 365,091.76 ton, hal ini masih belum sampai dengan target penanganan sampah yang ditentukan yaitu 72%.

Tingkat strategi pengelolaan sampah Kota Bekasi tahun 2021-2023 masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Capaian persentase pengelolaan sampah pada tahun 2021 sebesar 50,96%, tahun 2022 59,04%, tahun 2023 59,32%, dan pada tahun 2023 persentase pengelolaan sampah hanya mencapai 40,68%. Hal ini menunjukkan bahwa sampah yang dikelola oleh Kota Bekasi belum berjalan maksimal, karena dengan jumlah penduduk yang tinggi dan juga sebagai kota penyangga ibukota diperlukan pengelolaan yang lebih baik dan benar.

Selain itu juga permasalahan mengenai pengelolaan sampah bertambah jika sarana dan prasarana untuk mengangkut sampah dinilai masih kurang cukup untuk mengangkut sampah di Kota Bekasi yang memiliki jumlah sampah yang tinggi, dari hasil wawancara dengan pegawai DLH Kota Bekasi yang menyampaikan bahwa kendaraan operasional *truck* yang mengangkut sampah dari masyarakat menuju ke TPS hanya mampu mengangkut sekitar 5 ton saja dan kendaraan operasional yang ada di Kota Bekasi dinilai belum cukup untuk mengangkut sampah dengan jumlah

Kota Bekasi yang tinggi, itulah yang menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pengangkutan sampah di Kota Bekasi. Berikut adalah data kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi:

Tabel 1.2 Kendaraan operasional DLH Kota Bekasi 2023

No.	Wilayah	Jumlah Kendaraan Operasional
1.	Rawa Lumbu	23
2.	Bekasi Selatan	35
3.	Jati Asih	22
4.	Bekasi Timur	25
5.	Bekasi Utara	34
6.	Jalur Kontainer	24
7.	Bantar Gebang	12
8.	Medan Satria	20
9.	Pondok Melati	18
10.	Mustika Jaya	25
11.	Jalur Protokol	21
12.	Jati Sampurna	23
13.	Bekasi Barat	36
14.	Pondok Gede	30
Total		348

Sumber: DLH Kota Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi tentunya tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan ini, banyak upaya yang akan dilakukan. Berdasarkan Tujuan dilakukannya proses mengelola sampah diatur pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 adalah guna melakukan peningkatan pada kesejahteraan

masyarakat beserta mutu lingkungan hidup, memanfaatkannya sebagai sumber daya, melakukan peningkatan efisiensi dalam menggunakan bahan baku, serta melakukan perubahan pada perilaku tiap individu.

Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Bekasi berusaha mendorong partisipasi publik dalam program pengurangan dan penanganan sampah. Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, beserta pemrosesan akhir adalah semua kegiatan penanganan sampah, sedangkan pengurangan sampah mencakup kegiatan 5R, yaitu merenungkan kembali (*rethink*), mengurangi (*reduce*), meremajakan (*reuse*), mengumpulkan (*recycle*), dan mengembalikan (*recover*). Pemerintah Kota Bekasi diharapkan berupaya melakukan pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat diharapkan dapat menangani masalah sampah sebaik mungkin.

Pengelolaan sampah di Kota Bekasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bekasi, apakah semuanya berjalan lancar atau belum, serta mendeskripsikan dan melihat langsung bagaimana implementasi kebijakan yang diterapkan dalam konteks pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berlanjut di Kota Bekasi. Dengan begitu pengelolaan sampah yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan tujuan dari kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemangku kebijakan.

Mengacu pada permasalahan penanganan sampah di Kota Bekasi dalam penelitian yang ditulis oleh (Wardani, S.,2023) dikarenakan jumlah timbunan sampah yang masih sangat banyak, belum adanya sikap disiplin pada masyarakat dalam membuang sampah, kurangnya infrastruktur teknis untuk mendukung proses

pengolahan sampah di pembuangan akhir Sumur Batu serta kurangnya anggaran pelaksana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan penanganan sampah, termasuk anggaran untuk transportasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Hal tersebut juga terjadi dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Baskoro, P. A., Kurniawan, B., 2021) bahwa kebijakan gagal memenuhi kebutuhan masyarakat, menyebabkan lingkungan menjadi buruk.

Selain itu dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah ada faktor yang berpengaruh seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Arisandi, R., & Nariyah, H., 2019) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dimensi komunikasi, sumber daya, beserta struktur birokrasi masih tidak optimal serta perlu dilakukan peningkatan kembali. Hal ini membuktikan bahwa apabila implementasi kebijakan ingin berjalan dengan baik harus diperhatikan juga faktor-faktor yang dapat memberi pengaruh pada penerapan kebijakan tersebut.

Pemilihan lokus penelitian di Kota Bekasi karena peneliti mengetahui melalui berita bahwa permasalahan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Kota Bekasi menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sampah seperti belum tercapainya target manajemen sampah yang buruk, kondisi sarana dan prasarana yang buruk, jumlah timbulan sampah yang sudah melewati batas penampungan di TPA Sumur Batu, meningkatnya jumlah timbulan sampah dan bertambahnya jumlah penduduk Kota Bekasi setiap tahunnya, dan kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah. Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penting dilakukan penelitian ini karena akan membantu mengidentifikasi

masalah dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Bekasi yang masih tak optimal. Sehingga pertanyaan penelitian yang akan dijawab ialah mengapa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi masih belum optimal?

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Beberapa penjabaran yang telah dideskripsikan dalam latar belakang di atas, ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah-masalah yang menyebabkan permasalahan sampah di Kota Bekasi belum terselesaikan, yaitu:

1. Menurut data dari DLH Kota Bekasi, pengurangan sampah di Kota Bekasi belum mencapai target yang ditentukan.
2. Menurut data dari DLH Kota Bekasi, penanganan sampah di Kota Bekasi belum mencapai target yang ditentukan.
3. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Bekasi.
4. Sarana prasarana pengelolaan sampah di Kota Bekasi masih terbatas sehingga sampah tersebut belum sepenuhnya sampai di tempat pembuangan akhir.
5. Jumlah timbulan sampah sudah melewati batas penampungan TPA.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Dengan mempertimbangkan penjelasan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah seperti ini:

1. Bagaimana pemerintah Kota Bekasi melakukan implementasi kebijakannya untuk menyelesaikan masalah pengelolaan sampah?
2. Apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat pada pelaksanaan kebijakan untuk mengelola sampah di Kota Bekasi?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Dari temuan penelitian, penulis menetapkan tujuan penelitian seperti ini:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi.
2. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Setelah dilakukannya penelitian ini, penulis berharap adanya manfaat yang didapatkan melalui adanya penelitian ini, seperti mencakup:

1.5.1 Manfaat Akademis

Temuan dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana guna meningkatkan kecakapan berpikir ilmiah serta sistematis, serta kecakapan guna menulis karya ilmiah, dari analisis teori yang didapati melalui Program Studi Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat tentang tata kelola sampah di Kota Bekasi.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa membantu perkembangan ilmu administrasi publik, terkhususnya untuk meningkatkan dan memaksimalkan pengelolaan sampah serta bermanfaat untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Melalui penelitian ini juga diharapkan akademisi dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan membantu pemerintah untuk memaksimalkan manajemen lingkungan demi pembangunan yang ada di Kota Bekasi.

1.5.3 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian mampu dipergunakan oleh pemerintah untuk memproses penerapan kebijakan pengelolaan sampah untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Serta membuka wawasan dan pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan terutama kebijakan terkait pengelolaan sampah di Kota Bekasi.

1.6 KERANGKA TEORI

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Adapun pada penelitian menggunakan ringkasan dari artikel penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan akan permasalahan yang mana akan diteliti meliputi judul penelitian, peneliti, sumber jurnal, tujuan penelitian, hasil penelitian dan perbedaan penelitian yang sudah diteliti dengan yang akan diteliti.

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang sama agar nantinya dapat diketahui kesenjangan penelitian yang dapat menjadi fokus dari penelitian selanjutnya. Penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah belum pernah dilakukan observasi secara langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Kemudian penelitian sebelumnya hanya membahas pada bidang penerapannya bukan pada kebijakannya. Pada penelitian terdahulu ini beberapa artikel yang dicantumkan terkait pengelolaan sampah dapat dijadikan kajian dan berkembang secara keilmuan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdussamad, J., Prihatini, F., Tui, D., Mohamad, F., Dunggio, S. (2022). Dengan judul penelitian “Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Bone Bolango”. Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui bagaimana program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango digunakan guna menerapkan kebijakan pengelolaan sampah. Adapun pendekatan secara kualitatif deskriptif dipergunakan pada penelitian ini. Dipaparkan pula bahwa kebijakan tata kelola sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango dari hasil penelitian telah dilaksanakan dengan baik pada hal tanggung jawab, berkelanjutan, keuntungan, dan nilai ekonomi, tetapi masih belum berjalan dengan baik karena banyak hambatan yakni adanya keterbatasan untuk membangun bank sampah, kekurangan SDM, kurangnya penggajian, dan kurangnya pengawasan pada bank sampah oleh pemerintah.

Dari hasil yang diperoleh Yusrival, Y. (2022) pada penelitiannya. Dengan tajuk penelitian “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Bukit Asri”. Sejauh mana kebijakan kelola sampah berhasil diterapkan di TPS Bukit Asri adalah maksud daripada penelitian ini. Diterapkan pendekatan kualitatif pada penelitian. Kebijakan pengelolaan sampah pada TPS Bukit Asri pada gambaran umumnya sudah dilaksanakan secara baik sebagaimana dipertunjukkan oleh penelitian ini. Hal ini karena kebijakan ini dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat perkotaan, terutama di wilayah yang padat penduduk.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitroni, T. I. (2018). Memiliki judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kabupaten Lamongan”. Dengan maksud guna melihat bagaimana penerapan kebijakan

pengelolaan sampah perkotaan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lamongan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menjadi tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dengan hasilnya memaparkan organisasi PRKP dan Lingkungan Hidup, yang mengemban tanggung jawab guna melakukan kebijakan, belum memiliki sinergi dan program yang terintegrasi.

Berdasarkan penelitian yang dikerjakan oleh Purnamasari, Ema. (2019). Dengan tajuk penelitian “Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada perusahaan daerah kebersihan Kota Bandung”. Dengan guna mengetahui berbagai faktor penghambat pelaksanaan kebijakan kelola sampah beserta usaha yang dikerjakan guna melakukan antisipasi faktor-faktor tersebut menjadi tujuannya. Adapun pendekatan kualitatif deskriptif dipergunakan pada penelitian kali ini. Dipaparkan meskipun tidak optimal, namun tetap berjalan secara baik kebijakan tata kelola sampah pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagaimana dipaparkan pada hasil penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Daenie, M., & Rizqi, H. (2021). Dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang”. Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui bagaimana kebijakan, terkhusus Pasal 17 Perda No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, diterapkan. Diterapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menunjukkan adanya pelaksanaan yang masih tidak optimal meskipun Pemerintah Kota Semarang telah melakukan amanat pasal 17. Hal ini disebabkan oleh jumlah sampah yang terus mengalami pertambahan, di mana masih tidak sepenuhnya

didukung oleh sarana prasarana yang lebih baik, mutu tenaga kerja yang kurang, serta masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan”. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah serta mengetahui faktor penghambatnya. Digunakan pendekatan secara kualitatif deskriptif dengan hasil memaparkan bahwa meskipun kebijakan Perda No. 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilaksanakan seturut dengan persyaratan serta prosedur yang sudah ditentukan, di mana tidak sepenuhnya diterapkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amir, M., Anto, R. P. (2018). Dengan judul “*A Study Policy Implementation of Waste Management in Konawe Regency-Indonesia*”. Ini diperuntukkan guna melihat bagaimana kebijakan tata kelola sampah yang diterapkan pada Kabupaten Konawe. Dilakukan pula penerapan pendekatan secara kualitatif dengan ditemukan Dinas Hidup Kabupaten Konawe telah melakukan kebijakan pengelolaan sampah dengan baik dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.

Dari penelitian yang dikerjakan Rahman, A., Myrna, R., Karlina, N. (2020). Dengan judul penelitian “*Policy Implementation of Solid Waste Management by The Environmental Office of Bekasi Regency*”. Menggambarkan bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah menjadi tujuan dari penelitian.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil memaparkan kebijakan tata kelola sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi belum dilaksanakan secara baik. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya beserta anggaran, ketidakmampuan dalam mengembangkan inovasi, dan dampak pada pandangan masyarakat.

Dari penelitian yang dikerjakan Naufal Abiyyu, R., Yuniningsih, T., & Afrizal, T. (2023). Dengan tajuk penelitian Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah). Studi ini diperuntukan untuk menyelidiki seberapa efektif Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah) dilaksanakan. Penelitian ini mempergunakan teori Riant Nugroho dan Van Meter Van Horn. Metode kualitatif deskriptif dipergunakan serta memaparkan kebijakan, target, dan proses yang tepat belum digunakan saat menerapkan kebijakan penanganan sampah ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh minullah, M., Hariyanto, T., Widjajani, R. (2022). Dengan judul penelitian "*Study on the Implementation of Waste Management Policies in Probolinggo Regency*". Tujuan dari penelitian ini ialah guna menjelaskan serta melakukan analisis bagaimana kebijakan pada saat melakukan kelola sampah pada Tempat Pengolahan Akhir sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo diterapkan, serta untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang membantu serta menghambat penerapan kebijakan itu. Pendekatan kualitatif dipergunakan pada studi ini dengan hasil menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Probolinggo telah menerapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah secara sukses. Ini terutama berlaku untuk pengolahan sampah di kantor tersebut.

Tabel 1.3 Penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori	Metode	Hasil
1.	Abdussamad, J., Prihatini, F., Tui, D., Mohamad, F., Dunggio, S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE BOLANGO	Tujuan dari penelitian ialah guna mengetahui bagaimana program bank sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango dipakai guna melakukan penerapan kebijakan pengelolaan sampah.	Teori dasar yang ditemukan oleh Randall B. Ripley dan Grace Franklin dalam Tahir (2014) mencakup tiga komponen yang berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan: kelancaran rutinitas operasi, tingkatan kepatuhan implementor bank sampah pada peraturan Permen LH Nomor 13 tahun 2012 mengenai	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif, dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, dan nilai ekonomi adalah beberapa elemen yang dievaluasi dalam penelitian ini.	Hasil penelitian mempertunjukkan bahwa, dalam keseluruhannya, kebijakan kelola sampah melalui program bank sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango sudah dikerjakan secara baik pada hal tanggung jawab, berkelanjutan, keuntungan, dan nilai ekonomi. Namun, kebijakan masih kurang efektif karena terdapat beberapa kendala, yakni mencakup keterbatasan bangunan bank sampah, kekurangan SDM dan biaya yang tinggi untuk pekerja.

			Reduce, Reuse, dan Recycle pada kelola sampah pada tingkat masyarakat.		
2.	Yusrival, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Bukit Asri.	Penelitian memiliki tujuan guna mengevaluasi seberapa efektif kebijakan pengelolaan sampah pada TPS Bukit Asri.	Penelitian ini berfokus pada perilaku hubungan antar organisasi, implementor tingkat bawah, serta kelompok sasaran saat menanggapi kebijakan tersebut, menggunakan teori Soren C. Winter.	Penelitian ini dilakukan secara kualitatif.	Menurut hasil penelitian, kebijakan pengelolaan sampah pada TPS Bukit Asri secara keseluruhan berjalan baik. TPS Bukit Asri dan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba bekerja sama, komitmen, dan koordinasi. Selain itu, para pengelola TPS menunjukkan kontrol organisasi, moral kerja, dan profesionalisme. Selain itu, pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri dianggap bermanfaat bagi daerah padat penduduk, dan masyarakat menanggapinya dengan baik.
3.	Fitroni, T. I. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan	Analisis didasarkan pada teori Implementasi	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan	Hasil penelitian mempertunjukkan bahwa meskipun program pengelolaan sampah terintegrasi, masih ada masalah komunikasi

	Perkotaan Di Kabupaten Lamongan.	menjelaskan bagaimana kebijakan pengelolaan sampah perkotaan diterapkan di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini berfokus pada fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan.	Kebijakan model Edward III 1980.	kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan analisis menyeluruh dan mengungkap secara rinci berbagai arti dari fenomena sosial yang berbeda.	antara institusi yang bertanggung jawab, yaitu Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, ada kekurangan infrastruktur dan fasilitas untuk pengelolaan sampah.
4.	Purnamasari, Ema. (2019). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada perusahaan daerah kebersihan Kota Bandung.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana	Teori penerapan kebijakan George C. Edward III digunakan. Teori ini membahas	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,	Hasil penelitian mempertunjukkan bahwa, meskipun tidak optimal, kebijakan kelola sampah pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dilaksanakan

		kebijakan pengelolaan sampah diterapkan di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menemukan faktor-faktor yang menghambat penerapan kebijakan tersebut dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaikinya.	empat aspek keberhasilan dan kegagalan penerapan kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.	wawancara, dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman.	dengan baik. Keseluruhan proses dipengaruhi secara signifikan oleh masalah yang ditemukan selama proses implementasi.
5.	Daenie, M., & Rizqi, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang	Teori George C. Edwards III (1980) digunakan untuk menjelaskan implementasi kebijakan sebagai tahap antara pembentukan	Untuk menjelaskan masalah, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Semarang telah menerapkan Pasal 17, pelaksanaannya belum optimal sebab produksi sampah yang kian meningkat, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kualitas tenaga kerja yang rendah, dan

		diterapkan, dengan penekanan khusus pada Pasal 17 Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.	kebijakan serta dampak kebijakan untuk masyarakat yang terkena dampaknya.		partisipasi masyarakat yang rendah.
6.	Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diterapkan di Kabupaten Bengkulu Selatan dan menemukan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.	Teori George C. Edward III digunakan, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.	Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif. Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda No. 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan telah memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditentukan, belum sepenuhnya dalam pelaksanaannya memenuhi isi kebijakan dan terjadi ketidaksesuaian.
7.	Dely Farhani, S., Yuniarno, S., Fitria Widiyanto, A., Susanna, D. (2019). The Determinant of Trash Management at	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan	Teori Tchobanoglous et al. (1993) menerangkan	Studi deskriptif-analitis ini menggunakan pendekatan	Hasil analisis bivariat mempertunjukkan bahwa hanya situasi timbulan sampah ($p=0,003$) serta kecukupan sarana ($p=0,028$)

	Faculty of Health Sciences in a University in Banyumas Regency.	penyimpanan dan pengangkutan sampah serta mengurangi praktik pengolahan sampah yang tidak ramah lingkungan, seperti pembakaran sampah di area terbuka di Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes), yang dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.	bahwa timbulan sampah dipengaruhi oleh frekuensi pengumpulan sampah.	kuantitatif dan memiliki desain studi cross-sectional. Tempatnya adalah di Universitas FIKes, yang terletak di Kabupaten Banyumas.	yang berhubungan dengan hasil pengelolaan sampah kampus.
8.	Amir, M., Anto, R. P. (2018). A Study Policy Implementation of Waste Management in Konawe Regency-Indonesia.	Studi ini menyelidiki bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diterapkan di Kabupaten	Untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan, teori George C. Edward III digunakan. Teori	Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan	Hasil penelitian mempertunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe telah melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, berdasar pada komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.

		Konawe, Indonesia.	ini mempertimbangkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	pengelolaan sampah dilaksanakan di Kabupaten Konawe.	
9.	Rahman, A., Myrna, R., Karlina, N.(2020). Policy Implementation of Solid Waste Management by The Environmental Office of Bekasi Regency.	Studi ini meneliti bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menerapkan kebijakan pengelolaan sampah.	Peneliti melakukan berbagai teknik untuk menganalisis data, termasuk penyajian data, penarikan kesimpulan, dan reduksi data (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Mereka menggunakan teori penerapan kebijakan Smith untuk menjernihkan pemikiran.	Strategi studi kasus instrumental tunggal digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Kasus-kasus yang relevan dipilih untuk memberikan fokus pada fenomena dan masalah saat ini.	Hasil penelitian mempertunjukkan bahwa kebijakan kelola sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tidak berjalan dengan baik. Ini dikarenakan oleh keterbatasan sumber daya serta anggaran, kurangnya inovasi, dan pengaruh masyarakat yang kurang. Namun, karena telah bekerja sama dengan pihak-pihak di level yang lebih tinggi, upaya Dinas Lingkungan Hidup dapat dianggap cukup baik.

10.	Minullah, M., Hariyanto, T., Widjajani, R. (2022). Study on the Implementation of Waste Management Policies in Probolinggo Regency.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan analisis tentang kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Akhir di Kabupaten Probolinggo yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012.	Penulis penelitian ini menggunakan banyak teori, tetapi teori yang paling relevan untuk kebijakan publik adalah teori Leo Agustino dari Carl J. Federick.	Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 3 Tahun 2012 menetapkan metodologi penelitian kualitatif.	Hasil penelitian mempertunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo telah berhasil menerapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 terkait Pengelolaan Sampah, terutama pada hal pengolahan sampah di wilayah tersebut.
11.	Wardani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kendala, bantuan, dan upaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan penanganan	Dalam penelitian ini, teori Thomas R. Dye tentang kebijakan publik digunakan.	Penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumen, dan material digital.	Kebijakan penanganan sampah di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, masih belum efektif. Ini ditunjukkan oleh banyaknya timbunan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah, kekurangan infrastruktur teknologi di TPA Sumur Batu, dan kurangnya anggaran pelaksanaan untuk meningkatkan efisiensi dan

		sampah di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.			efektivitas penanganan sampah, termasuk transportasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
12.	Baskoro, P. A., Kurniawan, B. (2021) Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.	Studi ini melihat bagaimana kebijakan penanganan sampah diterapkan di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.	Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan publik.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menyebabkan kualitas lingkungan buruk.
13.	Nurlina, L., Muhafidin, D., & Sukarno, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang).	Studi ini menyelidiki bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diterapkan di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang, Kabupaten Bandung.	Teori Budiman Rusli tentang penerapan kebijakan dipergunakan, yang mencakup isi maupun konten kebijakan, implementasi kebijakan, kelompok target,	Penelitian ini dilakukan secara kualitatif.	Penelitian menunjukkan bahwa Wilayah Pelayanan Sampah Soreang, Kabupaten Bandung, belum menerapkan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif.

			dan lingkungan kebijakan.		
14.	Iqbal, M., Mulyadin, R. M., Ariawan, K., & Subarudi, S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta.	Studi ini menyelidiki bagaimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah diterapkan di Provinsi DKI Jakarta.	Peneliti memakai teori Van Meter beserta Van Horn terkait penerapan kebijakan publik dalam penelitian ini. Hal ini terutama berlaku bagi beberapa faktor yang berpengaruh pada penerapan.	Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan peraturan daerah yang berlaku diterapkan.	Menurut hasil penelitian, kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta belum diterapkan secara baik. Ada berbagai hambatan, salah satunya anggaran yang besar tetapi terbatas.
15.	Naufal Abiyyu, R., Yuniningsih, T., & Afrizal, T. (2023). Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016	Studi ini memakai teori Van Meter, Van Horn serta Riant Nugroho tentang ketepatan implementasi.	Penelitian ini memanfaatkan analisis deskriptif kualitatif.	Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan, target, dan proses implementasi kebijakan penanganan sampah ini tidak tepat.

		(Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah) dilaksanakan.			
16.	Rachman, S. A., Hamdi, M., Djaenuri, A., & Sartika, I. (2020). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PENGELOLAAN SAMPAH REFUSE DERIVED FUEL (RDF) DI KABUPATEN CILACAP.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pengelolaan sampah bahan bakar yang tidak dihasilkan (RDF) dilaksanakan di Kabupaten Cilacap.	Karena dianggap lebih sesuai dengan situasi di mana kebijakan pengelolaan sampah diterapkan, pendekatan teori Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai landasan teori.	Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik pengelolaan sampah RDF tidak berjalan dengan baik. Keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya keuangan dan kurangnya komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.
17.	Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor, I., Pengelolaan Sampah, T., & Agustino, L. (2022). JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies).	Studi ini menyelidiki bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diterapkan di Kabupaten Lebak.	Peneliti menggunakan teori Edward III dalam penelitian ini.	Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan peraturan daerah, pendekatan studi kasus kualitatif digunakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah telah dibuat, praktiknya masih belum optimal. Ketiadaan sosialisasi, kekurangan peralatan, jumlah pekerja yang terbatas, ketidakkonsistensi pemerintah desa, ketidakdisiplinan petugas

					sampah, dan ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah adalah beberapa masalah yang diidentifikasi.
18.	Dewintha, A., (2015) Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Kelurahan Sungai Pinang dalam Kecamatan Sungai Pinang pada UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.	Studi ini menyelidiki bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diterapkan di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, yang ditangani oleh Unit Pengelolaan Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.	Dalam penelitian ini, teori penerapan kebijakan publik Edward III digunakan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan berkonsentrasi pada berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk pemilahan kembali, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Hasil penelitian mempertunjukkan bahwa kebijakan kelola sampah pada Kelurahan Sungai Pinang belum dilaksanakan dengan baik. Baik pemerintah ataupun masyarakat masih kurang terlibat pada kelola sampah.
19.	Arisandi, R., & Nariyah, H. (2019). Jurnal Publika Unswagati Cirebon IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana	Peneliti menggunakan teori penerapan kebijakan publik Edward III untuk	Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan wawancara	Hasil penelitian mempertunjukkan bahwa, dalam pelaksanaannya, kebijakan kelola sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, khususnya di

	PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru).	kebijakan pengelolaan sampah diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Studi ini berfokus pada Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru.	memeriksa masalah dalam penelitian ini.	mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan.	Tempat Penampungan Sampah Terminal Weru, belum optimal. Ada kebutuhan untuk peningkatan komunikasi, sumber daya, serta struktur birokrasi.
20.	Yulistia, G., Suryaningsih, M., Rostyaningsih, D., Publik, J. A., Profesor, J., Soedarto, H., Hukum, S., & Semarang, T. (2013). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA SEMARANG MENURUT PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dan menemukan faktor-faktor yang mendorong dan	Teori Edward III digunakan dalam penelitian ini guna melakukan analisis penerapan kebijakan.	Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran lengkap tentang subjek penelitian.	Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kelola sampah tidak sepenuhnya berhasil dalam degradasi kuantitas timbulan sampah.

		menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.			
--	--	--	--	--	--

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi bisa ditinjau melalui sudut pandang arti yang sempit maupun luas. Administrasi dalam pengertian sederhana merupakan kegiatan menulis atau menyimpan catatan atau sering juga disebut sebagai kegiatan tata usaha, sementara administrasi dalam arti yang lebih luas memiliki makna proses koordinasi secara logis dan masuk akal oleh sekelompok orang, guna tercapainya suatu *goals* yang telah ditetapkan (Erika, Revida, 2020). Pengertian publik sendiri secara konsep dipahami sebagai “orang banyak, masyarakat, serta negara”. Namun demikian secara sosiologi istilah publik jauh lebih luas apabila dibandingkan dengan masyarakat (Kadir, 2020).

Adapun menurut (Kadir, 2020) yang menyatakan Administrasi publik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dan program pemerintah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep ini, administrasi publik harus berfokus pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kadir menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan penerapan teknologi informasi dalam administrasi publik modern.

Selain itu mengacu pada pernyataan *Nicholas Henry* (dalam Pasolong 2019:9) menyatakan Administrasi publik ialah gabungan dari teori beserta praktik yang bersifat kompleks, yang tujuannya memperkenalkan pemerintah kepada masyarakat yang diatur, yang memacu kebijakan publik agar dalam memenuhi hal yang dibutuhkan sosial secara responsif. Dilakukan upaya oleh administrasi publik untuk menjadikan Menerapkan metode manajemen yang memastikan pencapaian

efektivitas sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung, efisien untuk memenuhi kebutuhan umum baik secara keseluruhan maupun sebagian saja.

Berdasarkan pengertian dari para ahli sesuai yang telah diuraikan sebelumnya hal tersebut Bisa disimpulkan bahwa administrasi publik melibatkan koordinasi antara manajemen atau organisasi dalam prosesnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum atau pemerintah dan kebijakan publik yang dilakukan untuk mencapai tujuan kenegaraan.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Ilmu Administrasi Publik sebagai disiplin sudah melewati perkembangan secara kompleks, hal ini dapat dijelaskan melalui rangkaian yang terjadi dalam perkembangan administrasi publik dari setiap pergeseran paradigma, pergeseran paradigma seringkali ditandai dengan pergeseran lokus dan fokus ilmu administrasi publik yang menunjukkan bahwa disiplin ilmu ini mengalami perkembangan. Berikut merupakan esensi dari paradigma yang diuraikan (Nicholas Henry dalam Keanyibe et al., 2017: 3-6). Berikut adalah paradigma menurut Nicholas Henry:

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma dikotomi politik serta administrasi adalah gagasan yang memisahkan fungsi mengelola urusan politik dan administrasi pemerintah dengan tujuan meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan efektif. *Goodnow* dalam (Keban, 2014: 32) menyatakan walaupun politik harus terfokus dalam menjalankan kebijakan dan mewujudkan kehendak rakyat, pemerintahan perlu memperhatikan bagaimana kebijakan atau kehendak tersebut diimplementasikan dan dijalankan. Isi dari paradigma ini menyatakan bahwa administrasi publik harus dipandang

memiliki nilai-nilai liberal dan bertujuan Untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan ekonomi dari sistem administrasi yang terorganisir pemerintahan. Woodrow Wilson memelopori paradigma ini dengan Mengutarakan empat kriteria untuk pemerintahan yang berhasil meliputi: (1) membedakan antara urusan politik dan administratif; (2) melakukan perbandingan antara struktur organisasi politik dan bisnis; (3) meningkatkan produktivitas melalui pendekatan dan prinsip yang mirip dengan praktik bisnis dalam operasi keseharian; serta (4) melakukan peningkatan kinerja pelayanan publik dengan memperkuat manajemen beserta pengembangan karyawan negeri dan memacu penilaian berdasarkan pencapaian.

Lebih lanjut, menurut Henry, untuk memperkuat perbedaan pemikiran dalam dikotomi politik dan administrasi dapat dilakukan dengan mengaitkan Pembagian antara nilai dan fakta yang tepat. Akibatnya, semua hal yang dipelajari oleh administrasi publik dibidang eksekutif dipenuhi dengan warna dan legitimasi yang faktual dan ilmiah, sedangkan kajian mengenai pembuatan kebijakan publik dan isu-isu terkait lainnya diserahkan kepada ahli politik. Dalam paradigma ke-1 hanya menekankan kepada aspek hanya fokus pada administrasi pemerintahan, tetapi tidak diuraikan dengan jelas mengenai fokus pada pandangan ini secara lebih mendetail.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma prinsip-prinsip administrasi merupakan perkembangan yang berorientasi pada manajemen melalui peningkatan administrasi publik. Fokus pada paradigma ini yakni suatu kecakapan membentuk prinsip administrasi. Sedangkan

lokusnya dapat berlaku dimanapun, sebab prinsip selalu konstan menjadi prinsip, serta administrasi selalu konstan menjadi administrasi. (Muhammad, 2019: 44- 45).

Dalam paradigma ini terdapat keyakinan adanya prinsip-prinsip administrasi yang bisa dipakai untuk meningkatkan kinerja dan hasil secara lebih efisien pada pemerintahan. Gulick dan Urwick membahas tujuh asas administratif yang disebut sebagai *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* dan *Budgeting* (POSDCORB).

3. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Dalam paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik terjadi pertentangan terhadap disiplin ilmu administrasi publik. Terdapat upaya dari para ahli manajemen untuk mengklaim disiplin administrasi publik dalam periode sama. Pada periode ini (Basheka, 2012: 43) menggambarkan sebagai era kekosongan dikotomi dan menusuk prinsip-prinsip. Pemisahan Administrasi dan politik tidak mungkin terjadi pada pemerintahan. Gaus mengatakan bahwa teori administrasi publik sama dengan teori politik. Sementara Herbert A. Simons melalui karyanya “Perilaku Administratif: Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administratif” yang berisi kritik terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku secara universal. Hasilnya yaitu dengan pembaruan kembali fokus pada institusi birokrasi pemerintah, namun dalam kerangka pandangan ini, fokusnya menjadi terdistorsi. yaitu prinsip-prinsip administrasi publik.

Administrasi publik pada perkembangannya hanya didefinisikan sebagai suatu penekanan atau *area of interest*, yakni persamaan dari ilmu politik. Pendekatan tersebut terus menekankan pada pendekatan birokrasi, yang mengarah

pada birokrasi berlebihan dan difusi administrasi publik yang ada di bagian setiap aspek pemerintahan mulai dari penentuan kebijakan hingga implementasi.

4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)

Telah umumnya diperluas dengan ilmiah serta mendalam pada kerangka ini terkait akan prinsip manajemen terdahulu. Terdapat beberapa pokok perhatian dalam kerangka pemikiran ini, yang mana mencakup praktek-praktek organisasi, penelaahan manajemen, penggunaan teknologi mutakhir seperti pendekatan kuantitatif, evaluasi sistem, studi operasional, dan aspek serupa. Bukan hanya pada lingkup perbisnisan yang menjadi pusat perhatian yang berkembang dalam paradigma keempat dengan diasumsikan bisa digunakan, namun pula administrasi publik juga, sehingga membuat adanya ketidakjelasan tempat pelaksanaannya (Keban, 2014: 33).

5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970)

Terdapat usaha untuk merestrukturisasi administrasi publik sebagai area studi mandiri pada tahap ini. Fokus administrasi publik adalah pada hierarki, dan birokrasi dialihkan ke organisasi pasar dan sektor swasta. Dapat dikatakan bahwa terjadi transisi dari bentuk administrasi publik yang konvensional ke bentuk model NPM (*New Public Management*).

NPM muncul untuk menghadapi masalah yang sama yaitu inefisiensi dalam sistem administrasi. Administrasi publik tradisional atau konvensional menganggap pemerintah sebagai aktor yang otonom dan otoritatif melalui struktur dan proses birokrasi, hierarkis, dan proses pemberian pelayanan publik. Terdapat fokus beserta titik berat di mana secara jelas terdefinisi pada paradigma. Adanya kecenderungan

berpusat pada teori organisasi, manajemen, beserta kebijakan publik yang menjadi konsen administrasi publik pada paradigma. Sebaliknya, beragam masalah beserta kepentingan masyarakat menjadi titik beratnya.

6. Paradigma *Governance* (1990)

Berkembangnya zaman dapat melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan baru sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada masa lalu atau memperbaiki ilmu pengetahuan yang sudah ada. Paradigma administrasi publik terus mengalami perubahan hingga melahirkan paradigma baru yaitu *Governance* atau *New Public Service*.

Dalam pendekatan *governance* lebih berorientasi pada partisipasi dan kerjasama dengan berbagai jaringan aktor. Pada hakikatnya pemerintah melibatkan kemitraan seperti masyarakat, LSM, sektor publik, dan sektor swasta dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah mengatur melalui kolaborasi hirarki birokrasi dan jaringan aktor untuk mencapai efisiensi dan nilai-nilai penting lainnya. Oleh karena itu, untuk menggambarkan suatu proses fundamental pada pemerintahan modern yang memiliki perbedaan dengan jalannya pemerintahan tradisional diperlukan pengertian secara mendalam mengenai *governance*.

Berdasarkan uraian paradigma administrasi publik yang sudah dijelaskan di atas, penelitian mengenai pengelolaan sampah ini masuk ke dalam paradigma ke-5 (lima) yaitu pandangan tentang administrasi publik sebagai administrasi publik, karena pada model ini telah memiliki penekanan beserta titik fokus yang terdefinisi dengan baik yaitu kebijakan publik. Fokus penelitian administrasi publik ialah memeriksa bagaimana kebijakan tata kelola sampah di Kota Bekasi dijalankan.

Sehingga faktor pendukung beserta penghambat dapat dianalisis pada pengelolaan sampah yang nantinya akan diusulkan saran yang sesuai untuk menangani masalah sampah di Kota Bekasi.

1.6.4 Kebijakan Publik

Mengacu pada pernyataan *Harold D. Lasswell* serta *Abraham Kaplan* pada (Suwitri,2022) menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu rancangan untuk mencapai tujuan, moral, dan aksi-aksi yang terencana. Adapun menurut *J.E. Anderson* (dalam Abdul Kadir, 2020: 3), Kebijakan adalah suatu panduan tindakan dengan tujuan yang ditetapkan oleh satu atau lebih pihak untuk menyelesaikan masalah. Adanya pemusatan konsen akan tindakan sesungguhnya dan tidak berfokus di usulan maupun niat menjadi alasan pendekatan kebijakan dinilai sesuai.

Shafritz menjelaskan proses kebijakan meliputi agenda *setting*, kebijakan ditetapkan atau tidak etapkan, implementasi, dan evaluasi (Jay M. Shafritz, 2017). Proses Kebijakan menurut Anderson dalam (Rakhmat, 2018) meliputi Ada lima langkah, yakni mengenali masalah, menyusun agenda, merumuskan kebijakan, menerapkan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan. Berikut adalah penjelasan mengenai proses kebijakan publik, yaitu seperti ini:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ialah aktivitas menilai permasalahan yang dapat diangkat menjadi permasalahan publik. Masalah yang diangkat terdiri dari empat kondisi, yaitu area yang tercakup, durasi, keterkaitan dengan pihak lain, dan potensi risiko.

2. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah susunan rincian permasalahan maupun isu yang menjadi fokus dengan berbagai alasan, untuk diproses menjadi kebijakan.

3. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah kegiatan merumuskan guna mencari kemungkinan substitusi kebijakan dalam rangka pemecahan masalah.

4. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan dukungan sumber daya.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses menilai terkait perubahan masyarakat yang diharapkan sebagai dampak dari suatu kebijakan.

Dari penjelasan yang diberikan oleh para pakar mengenai definisi kebijakan publik di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan terkait fokus kebijakan publik dalam studi ini ialah pada pelaksanaan kebijakan, di mana implementasi kebijakan akan ditulis pada penelitian ini mengenai implementasi kebijakan Pengaturan pengelolaan sampah di Kota Bekasi seturut pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 yang menguraikan langkah-langkah dalam mengelola sampah, termasuk strategi untuk mengurangi serta menangani sampah di wilayah tersebut.

1.6.5 Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut definisi yang diberikan (Hill & Hupe, 2019) terkait akan implementasi kebijakan publik yang mengatakan implementasi kebijakan publik ialah fase kritis dalam proses kebijakan di mana keputusan pemerintah diubah

menjadi tindakan nyata. Proses ini mencakup serangkaian aktivitas termasuk pengorganisasian sumber daya, komunikasi, pengawasan, dan evaluasi. Implementasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai sasaran kebijakan.

Di samping itu, gagasan lain terkait pelaksanaan kebijakan publik menurut (Perdana & Pratama, 2019) adalah fase penting dalam siklus kebijakan dimana keputusan pemerintah diubah menjadi tindakan nyata. Proses ini melibatkan pengorganisasian sumber daya, koordinasi, komunikasi, dan pengawasan. Keberhasilan dalam implementasi adalah kunci untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah suatu fase kritis dalam siklus kebijakan di mana keputusan kebijakan diubah menjadi tindakan nyata (Nugroho, 2019). Proses ini melibatkan alokasi sumber daya, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan. Pemahaman yang baik tentang konsep implementasi kebijakan penting dalam mengevaluasi sejauh mana sebuah kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan.

1.6.6 Model Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan

Menurut (Nugroho, 2020) mengemukakan bahwa implementasi dapat dipecah lagi menjadi beberapa model pendekatan teoritis yang berbeda untuk setiap kebijakan yang ingin di implementasikan, yaitu sebagai berikut:

1. Model *top-down* menekankan peran pemerintah pusat dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan.
2. Model *bottom-up* menekankan peran lebih besar pada partisipasi masyarakat dalam proses implementasi.

3. Model *hybrid* berupaya menyelesaikan adanya kesenjangan pada antara dua model lainnya dengan menambahkan unsur teori *top-down*, *bottom-up* serta lainnya.
4. Model "*Three I's*" (*Issue, Institution, and Implementor*) adalah kerangka kerja yang membantu dalam memahami faktor yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan (Nugroho, 2019). Dalam teori ini isu kebijakan, institusi yang melaksanakan kebijakan, dan para pelaksana kebijakan merupakan sebuah elemen kunci yang harus diperhatikan dalam analisis implementasi.
5. Model Difusi Inovasi memfokuskan pada bagaimana inovasi atau perubahan dalam kebijakan dapat diterima dan diadopsi oleh aktor yang terlibat (Nugroho, 2018). Teori ini membantu dalam memahami proses perubahan yang terjadi selama implementasi kebijakan.

1.6.7 Model Implementasi Kebijakan Publik

Adanya sebuah proses yang penting pada saat pelaksanaan kebijakan yang dilibatkan. Permasalahan yang terjadi tidak terlaksana dengan baik karena implementasi kebijakan yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kebijakan, maka Model pelaksanaan kebijakan digunakan untuk memahami mekanisme pelaksanaan kebijakan. Menurut para ahli (Syahrudin, 2018), beberapa model implementasi kebijakan yaitu seperti ini:

1. Model Van Meter dan Van Horn

Dilakukan pengandaian pada model ini, dalam pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan berurutan mulai dari kebijakan publik, pelaksana, beserta hasil kinerja kebijakan publik. Berbagai faktor yang memberi pengaruh pada kebijakan publik dalam model ini adalah:

a. Standar dan sasaran kebijakan.

Tiap pelaksanaan kebijakan perlu memiliki pedoman beserta tujuan kebijakan yang terdefinisi dengan baik serta terstruktur agar dapat tercapai sesuai ketentuan. Jika pedoman dan sasaran kebijakan tidak cocok, dapat timbul beragam interpretasi dan menyebabkan konflik di antara pelaksana kebijakan.

b. Sumber daya

Sangat bergantungnya sebuah kesuksesan dalam melaksanakan kebijakan pada kecakapan untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan baik. Manusia menjadi aset utama dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan suatu proses. Ketika kemampuan dan keterampilan sumber daya terbatas, hasil kinerja kebijakan publik menjadi tidak maksimal.

c. Hubungan antar organisasi

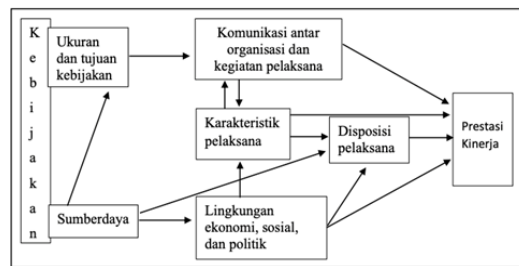
Perspektif terhadap pihak yang bertindak mencakup struktur resmi dan tidak resmi yang dilibatkan pada saat menerapkan kebijakan publik. Hal ini menjadi sangat esensial disebabkan cara para pelaksana bertindak akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan.

d. Karakteristik agen pelaksana

Semakin lancar koordinasi beserta komunikasi antara para pihak yang dilibatkan pada pelaksanaan kebijakan, maka akan membuat kemungkinan semakin minim kesalahan yang dapat memicu konflik.

e. Kecenderungan (disposisi) implementer

Penerimaan atau penolakan terhadap pelaku pelaksana memiliki dampak signifikan pada berhasil maupun gagalnya implementasi kebijakan publik. Fokus pada evaluasi kinerja implementasi kebijakan publik ialah sejauh mana interaksi dalam lingkup sosial, politik, serta ekonomi memfasilitasi terbangunnya determinasi keberhasilan kebijakan publik.



Gambar 1.6 Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn
Sumber: *Van Meter dan Van Horn* (1975) dalam Syahrudin (2018)

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Dalam model ini disebut sebagai Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Mazmanian dan Sabatier membagi proses implementasi kebijakan menjadi 3 faktor sebagai berikut:

a. Karakteristik Masalah

Tingkat kemudahan atau kesulitan suatu Isu yang diatur yang meliputi indikator teori dan teknis pelaksanaan, perilaku kelompok target, persentase kelompok target, dan jenis transformasi sikap yang diharapkan.

b. Karakteristik Kebijakan

Meliputi faktor kecakapan kebijakan guna mengatur proses pelaksanaan secara jelas beserta konsisten melalui penggunaan teori sebab-akibat, pengalokasian dana yang tepat, keterpaduan hierarkis antar lembaga pelaksana, peraturan pelaksana dari lembaga tersebut, serta perekrutan pejabat pelaksana dan transparansi pada pihak eksternal. Kemudian daripadanya, ada variabel pada eksternal kebijakan yang mana memiliki pengaruh pada proses pelaksanaannya, seperti indikator sosio-ekonomi & teknologi, dukungan publik, sikap & sumber daya dari konsisten, sokongan dari pejabat dengan strata lebih tinggi, serta komitmen beserta mutu kepemimpinan yang berasal oleh pejabat pelaksana.

c. Lingkungan Kebijakan

Proses penerapan melalui 5 langkah, pemahaman dari lembaga/badan yang melaksanakan pada wujud penyusunan kebijakan pelaksanaan, kepatuhan terhadap tujuan, hasil yang konkret, penerimaan terhadap hasil tersebut, beserta orientasi pada penyempurnaan kebijakan yang diimplementasikan serta secara keseluruhan kebijakan yang bersifat dasar.

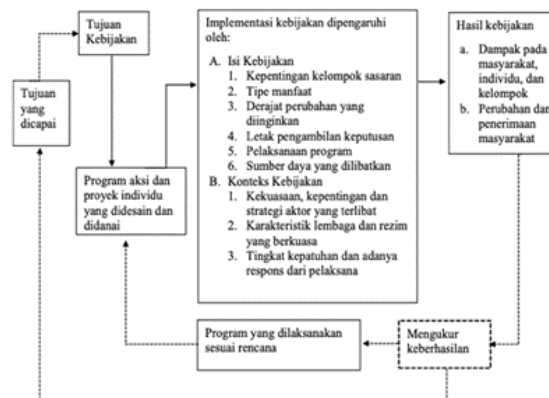


Gambar 1.7 Model implementasi kebijakan Mazmanian & Sabatier
Sumber: Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Syahrudin (2018)

3. Model Grindle

Dalam model ini implementasi kebijakan ditetapkan oleh isi kebijakan (*content of policy*) beserta konteks dari penerapannya (*context of implementation*). Ide yang menjadi landasannya ialah merancang ulang kebijakan dan kemudian mengimplementasikan kebijakan tersebut. Keberhasilan model ini bergantung pada tingkat kelayakan dari kebijakan tersebut. Grindle menyatakan bahwa parameter dari berhasilnya sebuah implementasi kebijakan bisa ditinjau melalui:

- a. Pada proses, bisa dinilai dari kesesuaian implementasi kebijakan dapat dinilai berdasarkan tindakan kebijakan.
- b. Tujuan kebijakan yang dicapai dengan mempertimbangkan faktor pengaruh sosial akan individu maupun kelompok dan tingkat transformasi yang terjadi, dan penerimaan kelompok sasaran.



Gambar 1.8 Model implementasi kebijakan S. Grindle
Sumber: Grindle (1980: 11) dalam Syahrudin (2018)

4. Model Edward III

Dalam model ini Edward mengetahui bahwa ada empat isu pokok yang harus menjadi perhatian dalam melakukan implementasi kebijakan agar mampu berjalan secara baik:

a. Komunikasi

Penentuan keberhasilan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi. Implementasi dapat tercapai secara dengan baik apabila adanya tanggapan dan pemahaman dari pembuat keputusan.

b. Sumber daya

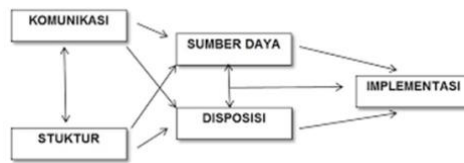
Salah satu hal esensial pada saat mengimplementasikan sebuah kebijakan baik dipengaruhi ketersediaan sumber daya. Kuantitas karyawan, kemahiran pelaksana, informasi relevan serta cukup guna melakukan implementasi kebijakan beserta pemenuhan berbagai sumber yang dibutuhkan pada pelaksanaan kebijakan, terdapat wewenang, serta adanya fasilitas pendukung menjadi komponen sumber daya.

c. Disposisi

Sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan bukan hanya sekedar mengetahui apa yang perlu dikerjakan, melainkan pula wajib mempunyai keterampilan guna melakukannya. Hal ini berkaitan dengan sikap pelaksana, meliputi kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana, dan intensitas respon tersebut.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi sebagai entitas implementasi kebijakan wajib melakukan dukungan terhadap kebijakan yang ditentukan secara politik melalui koordinasi yang tepat. Saat struktur birokrasi tak berfungsi secara baik, menjadikan tidak efisiennya sumber daya dan menyebabkan adanya hambatan pada implementasi kebijakan.



Gambar 1.9 Model implementasi kebijakan Edward III
Sumber: Edwards III (1980: 148) dalam Syahrudin (2018)

Implementasi kebijakan model Edward III dianggap paling sesuai dengan penelitian ini dibandingkan dengan model lainnya, karena menggunakan pendekatan model *top-down* yang mana pendekatan ini telah memiliki kesesuaian akan judul yang diteliti beserta fenomena yang ada dan model ini lebih mudah diterapkan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti memilih model ini dikarenakan kesesuaian antara permasalahan dengan fenomena yang diteliti. Adapun pemilihan model Edward III ini sudah melalui riset dari penelitian terdahulu, kemudian peneliti kembangkan dalam penelitian ini.

1.6.8 Pengertian Sampah

Sampah sendiri dapat didefinisikan sebagai bahan sampingan yang di mana mempunyai sifat padat (organik dan anorganik) di mana dianggap bukan hanya mempunyai nilai maupun wajib dimanfaatkan kembali sedemikian rupa. Ini

dilakukan guna meminimalisir dampak negatif yang dapat timbul untuk lingkungan hidup maupun pada pembangunan (SNI 19-2454-2002, 2002:2).

Menurut Soewondo (1983) dalam (Riduan, 2021:31), menyatakan bahwa sampah pada dasarnya merupakan segala hal di mana sudah tak dipakai lagi atau tak lagi dikehendaki lagi, yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia ataupun industri, serta tidak termasuk aktivitas biologis.

Berdasarkan pengertian mengenai sampah di atas, bisa disebut sampah ialah sebuah hasil buangan masyarakat maupun industri, baik yang berbentuk padat maupun setengah padat, yang telah tak mempunyai nilai guna serta mampu menimbulkan kerugian bagi lingkup hidup.

1.6.9 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah ialah serangkaian tindakan atau aktivitas yang merangkap pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, beserta pembuangan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Konsep ini menjadi dasar pemahaman kita tentang bagaimana pengelolaan sampah berperan dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah ialah sebuah proses manajemen kelola sampah selangkah demi selangkah di mana mencakup pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, dan pembuangan sampah. Istilah ini umumnya merujuk pada limbah yang diproduksi oleh kegiatan manusia di mana kemudian diolah dengan berbagai upaya guna melakukan minimalisir dampak negatif untuk kesehatan, lingkungan, dan keindahan. Kelola sampah juga dapat membantu

memperbaiki sumber daya padat, cair, gas maupun radioaktif secara lebih baik menggunakan teknik serta kecakapan tertentu pada tiap tipe bahan

Mengacu pada UU pengelolaan sampah No. 18 Tahun 2008, sampah ialah bahan padat yang diproduksi melalui aktivitas manusia dalam keseharian maupun proses alam. Maksud dari sampah spesifik ialah sampah yang membutuhkan tata kelola khusus sebab sifat, konsentrasi, beserta volumenya. Kelola sampah harus menjadi aktivitas yang tersistematis, komprehensif, serta berkelanjutan di mana mencakup degradasi serta penanganan sampah. Aktivitas degradasi mencakup:

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Daur ulang sampah
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Kemudian aktivitas dalam menangani sampah mencakup:

- a. Pemilahan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan
- e. Pemrosesan akhir

Studi pengelolaan sampah sudah banyak dikerjakan peneliti dari banyak negara dengan memakai pengertian yang berbeda-beda, yang mencakup *waste management* serta *solid waste management*. Adapun implementasi secara general yang dipakai dalam pengelolaan sampah adalah 3R yang kemudian diperbarui menjadi konsep 5R, yang mana tujuan dari konsep 5R ini adalah untuk mengurangi

dampak negatif sampah terhadap lingkungan (Soetomo, 2019). Berikut adalah penjelasan mengenai konsep 5R dalam pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut:

1. **Rethink (Berpikir Ulang)**: Mengajak individu dan masyarakat untuk mempertimbangkan kembali pola konsumsi dan pembuangan sampah dengan lebih bijak. Hal ini melibatkan kesadaran akan konsekuensi dari pemilihan produk dan gaya hidup.
2. **Reduce (Mengurangi)**: Mendorong pengurangan produksi sampah dengan cara menghindari atau mengurangi penggunaan bahan-bahan sekali pakai, mengurangi limbah di sumbernya, dan meminimalkan konsumsi berlebihan.
3. **Reuse (Menggunakan Ulang)**: Menggunakan kembali barang atau bahan yang masih layak guna, seperti kemasan, pakaian, atau peralatan, sebagai cara untuk mengurangi limbah.
4. **Recycle (Mendaur Ulang)**: Mendorong proses mendaur ulang berbagai bahan yang bisa dilakukan daur ulang seperti kertas, plastik, dan logam untuk mengurangi kebutuhan akan bahan mentah baru.
5. **Recover (Mengambil Kembali Nilai)**: Melibatkan upaya untuk menghasilkan energi atau bahan dari sampah yang tidak dapat digunakan kembali, seperti limbah organik, melalui proses seperti pembangkitan listrik atau pembuatan kompos.

1.6.10 Manajemen Pengelolaan Sampah

Manajemen pengelolaan sampah ialah pendekatan holistik pada saat mengelola semua aspek yang berkaitan dengan pengumpulan, pengangkutan,

pengolahan, dan pembuangan sampah. Model kerangka teoritis ini mencakup tiga komponen utama:

- 1. Sumber Sampah:** Identifikasi dan karakterisasi sumber sampah, termasuk jumlah, jenis, dan asal-usul sampah.
- 2. Proses Pengelolaan:** Tahapan pengumpulan, pemilahan, daur ulang, pengolahan, dan pembuangan sampah.
- 3. Pihak Terlibat:** Peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta LSM dalam manajemen kelola sampah.

Menurut (Hartono, 2020) dalam manajemen pengelolaan sampah melibatkan empat aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan adalah aspek dimana kelembagaan mewakili kebutuhan masyarakat dengan lembaga terkait dan hubungan dengan pihak swasta. Koordinasi antara dinas lingkungan hidup, pemerintah daerah, organisasi swasta, dan juga masyarakat.

2. Aspek Operasional

Aspek operasional adalah suatu faktor yang paling dekat dengan objek mengenai sampah dan bersifat terstruktur dan terpadu, dimulai daripada penampungan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, serta pengelolaan sampah.

3. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan adalah unsur pendukung untuk mendorong aktivitas kerja seluruh sistem yang meliputi sumber keuangan, sumber daya operasional, pemeliharaan, dan investasi.

4. Aspek Peraturan

Aspek peraturan adalah suatu faktor dinamis dalam pengelolaan sistem untuk mencapai tujuan yang efektif dan juga mencakup regulasi mengenai kebersihan lingkungan. Peraturan ini sangat diperlukan untuk menjamin secara hukum terlaksananya kegiatan.

1.7 OPERASIONAL KONSEP

1.7.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan pengurangan sampah menggunakan suatu sistem mulai dari pembatasan timbulan sampah sampai dengan pemrosesan akhir sampah serta kegiatan penanganan sampah yang dimulai dengan pengumpulan sampah dengan pemrosesan akhir sampah secara berkesinambungan dengan tujuan untuk menekan jumlah sampah yang ditimbulkan dengan pengurangan serta penanganan sampah yang baik di Kota Bekasi. Hal tersebut bisa ditinjau melalui fenomena seperti:

1. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah merupakan langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Bekasi sebagai usaha guna mengurangi kuantitas sampah yang diproduksi masyarakat Kota Bekasi. Langkah-langkah degradasi sampah mencakup

beragam gejala, yaitu: 1) Pembatasan timbulan sampah, 2) Pendaauran ulang sampah, dan 3) Pemanfaatan ulang sampah.

2. Penanganan Sampah

Usaha pemerintah Kota Bekasi guna menangani berbagai persoalan terkait sampah yang ada di Kota Bekasi ialah definisi dari penanganan sampah.

Kegiatan kelola sampah meliputi beberapa gejala, yakni: 1) Pemilahan, 2) Pengumpulan, 3) Pengangkutan, 4) Pengolahan, dan 5) Pemrosesan Akhir.

1.7.2 Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan

Ada faktor yang mendukung maupun menjadi hambatan pada saat melakukan implementasi kebijakan yang memiliki pengaruh pada keberlangsungan suatu kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi yang dapat diukur menggunakan fenomena seperti ini:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dipakai pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah merupakan sebuah proses penyampaian informasi kepada setiap pihak yang saling terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi sebagai bentuk pengenalan atau langkah awal untuk memahami kebijakan yang dirancang sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Gejala yang akan diamati dalam komunikasi, yaitu komunikasi internal dan eksternal, transmisi komunikasi, kejelasan komunikasi, beserta konsistensi komunikasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang terdapat pada implementasi kebijakan kelola sampah menjadi pengaruh penting yang mana berkaitan langsung dengan kebijakan

yang nantinya diberlakukan. Sumber daya tersebut digunakan instansi sebagai implementor, anggaran, sarana pendukung dan kewenangan pada pihak terkait dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Gejala yang akan diamati pada sumber daya, yakni SDM, informasi, serta wewenang.

3. Disposisi

Disposisi maupun biasa disebut dengan perilaku para pelaksana ialah suatu faktor esensial lain yang dapat memaksimalkan keberhasilan dari sebuah kebijakan, yang mana dalam penelitian ini pemerintah dan masyarakat Kota Bekasi yang mengerjakan kebijakan kelola sampah di Kota Bekasi. Gejala yang akan diamati dalam disposisi, yaitu sikap para pelaksana, pengaturan birokrasi, serta insentif.

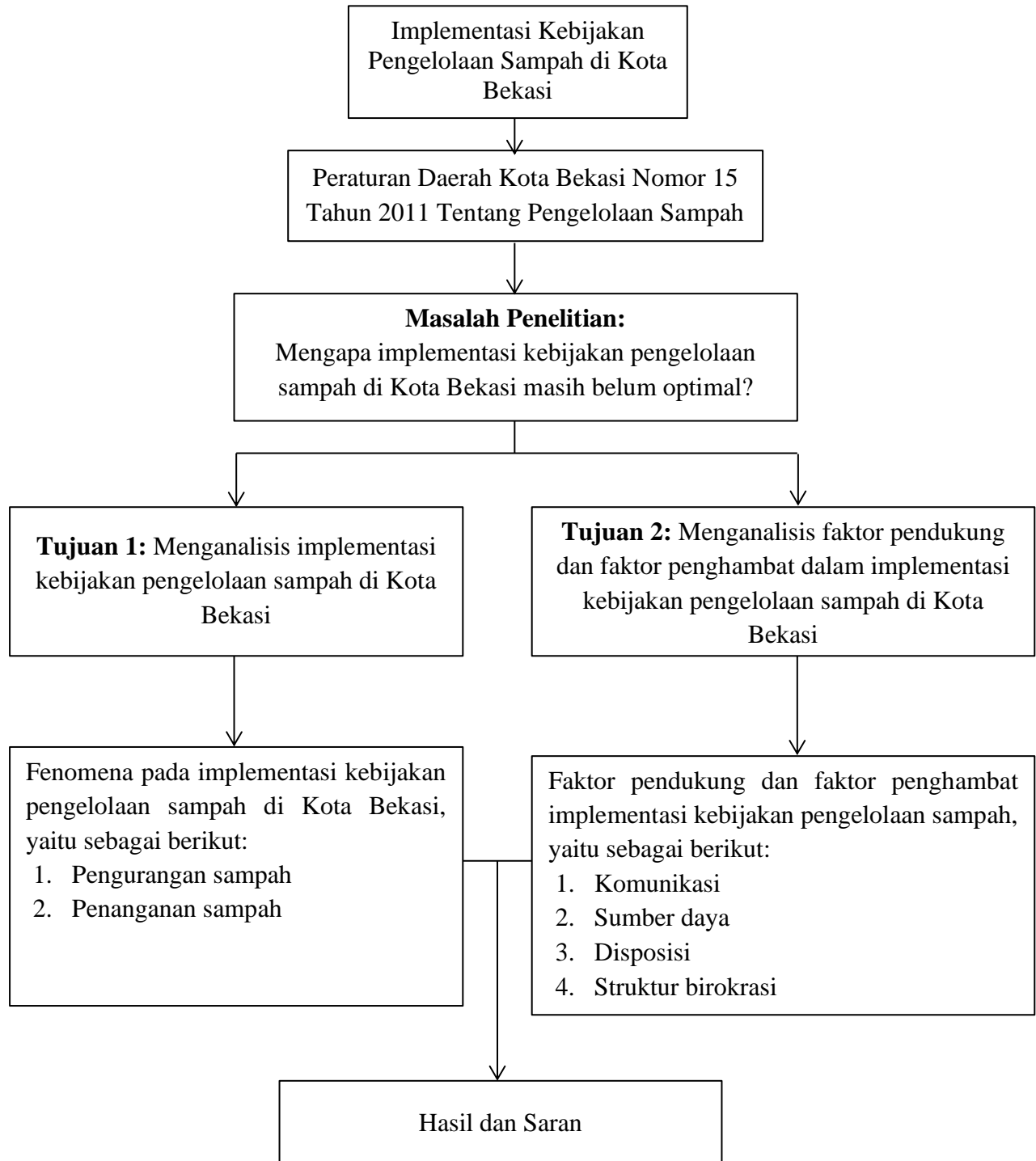
4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah pembagian tugas dan fungsi dari pihak terkait dalam melakukan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi yang disesuaikan dengan keahlian dan kewenangannya. Gejala yang akan diamati pada struktur birokrasi, yakni *Standard Operational Procedures* (SOP) serta fragmentasi.

Tabel 1.4 Fenomena penelitian

Fokus Penelitian	Fenomena	Gejala
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi	a. Pengurangan Sampah	1. Pembatasan timbulan sampah 2. Pendaauran ulang sampah 3. Pemanfaatan kembali sampah
	b. Penanganan Sampah	1. Pemilahan 2. Pengumpulan 3. Pengangkutan 4. Pengolahan 5. Pemrosesan akhir
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan	a. Komunikasi	1. Komunikasi internal dan eksternal 2. Transmisi komunikasi 3. Kejelasan komunikasi 4. Konsistensi komunikasi
	b. Sumber daya	1. Sumber daya manusia 2. Informasi 3. Wewenang
	c. Disposisi	1. Sikap para pelaksana 2. Pengaturan birokrasi 3. Insentif
	d. Struktur birokrasi	1. <i>Standard Operational Procedures</i> (SOP) 2. Fragmentasi

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 ARGUMENTASI PENELITIAN

Implementasi kebijakan menjadi suatu hal yang utama dalam proses analisis kebijakan dan sangat berpengaruh dalam faktor keberhasilan sebuah kebijakan. Pada implementasi kebijakan, permasalahan yang terkadang tidak ditemukan dalam konsep dapat muncul di lapangan. Pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, dalam keberjalanan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah dan lingkup hidup di Kota Bekasi. Kebijakan pengelolaan sampah ialah hasil adaptasi dari Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 mengenai kelola sampah yang mana peraturan ini dapat dijadikan hal yang melandasi sebuah kebijakan mengenai pengelolaan sampah agar kelola sampah di Kota Bekasi bisa dikelola secara baik, akan tetapi pada kenyataannya hasil dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi kerap ditemui beberapa permasalahan yang membuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak dapat berjalan secara optimal dan juga dikarenakan beberapa hambatan yang terjadi dalam hal peningkatan timbulan sampah, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan sampah terangkut, sarana maupun prasarana pada saat kelola sampah yang kurang mendukung, serta TPA yang tersedia sudah melebihi batas yang seharusnya, sehingga sangat berpengaruh dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu juga terdapat faktor-faktor terkait seperti komunikasi dan sumber daya yang membuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi belum berjalan secara optimal.

1.10 METODE PENELITIAN

Digunakannya metode penelitian kualitatif deskriptif guna menganalisis suatu persoalan pada pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini, peneliti membuat suatu deskripsi yang padat, menelaah ucapan atau kata-kata, informasi detail dari perspektif responden, dan melakukan pendalaman pada kondisi yang terjadi secara rinci.

1.10.1 Tipe Penelitian

Memakai metode penelitian kualitatif deskriptif dimana dilakukan dengan landasan upaya untuk menggambarkan kondisi variabel di lapangan. Menurut (Hardani, 2020: 54) penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian di mana mempunyai tujuan guna mengilustrasikan secara sistematis serta akurat terkait akan gejala, fakta, atau peristiwa yang berkaitan dengan karakteristik suatu populasi maupun lokasi tertentu. Pendekatan deskriptif digunakan dalam langkah upaya guna melakukan deskripsi akan gejala sosial tertentu dan melakukan perbandingan fenomena yang sudah ditetapkan dalam permasalahan kelola sampah di Kota Bekasi.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi dimana peneliti mengamati keadaan objek guna memperoleh data serta informasi yang memiliki kaitan akan hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan materi di atas, penelitian ini akan dipakai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi serta juga pada TPA Sumur Batu Kota Bekasi.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan personal, barang atau entitas hidup yang dipilih menjadi sumber informasi yang diperlukan peneliti dalam kolektif data penelitian (Utari, 2021). Pengambilan sampel berupa data dan informasi dengan asumsi tertentu misalnya individu tersebut paling mengetahui tentang informasi apa yang diinginkan. Teknik *Snowball* dipergunakan di sini, dimana dalam penghimpunan data yang awalnya sedikit kemudian menjadi banyak dengan menentukan *key informan* awal yang kemudian diarahkan kepada *key informan* lain sampai terjadi kejenuhan data atau data yang ingin didapat sudah terpenuhi, teknik *Snowball* ini dilakukan untuk memudahkan penelitian dalam memeriksa keadaan objek yang ditelisik. Pada penelitian ini sumber datanya atau *key informan* adalah Kepala Sub Koordinator dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

1.10.4 Jenis Data

Menurut (Lofland,2019) data kualitatif adalah suatu data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Jenis data ini meliputi kegiatan wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Maksud dari berbagai kata maupun aktivitas disini adalah kata-kata dan aktivitas individu yang dilihat maupun dilakukan wawancara ialah sumber data primer. Disisi lain, sumber data tertulis atau sekunder serta dokumentasi yang mencakup foto menjadi sumber data lainnya.

1.10.5 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapati secara langsung oleh peneliti dari observasi maupun wawancara terhadap informan maupun responden. Wawancara terhadap informan akan dilakukan oleh peneliti guna memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini didasarkan pada sumber data utama yaitu kepala Sub Koordinator bagian pengurangan dan penanganan sampah serta para pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah suatu informasi tambahan untuk menutupi kekurangan pada data primer. Adapun maksud dari data tambahan antara lain dokumen dan arsip yang diperoleh melalui beragam sumber, foto pendukung yang telah tersedia, maupun foto yang diproduksi secara mandiri, serta data yang memiliki kaitan dalam penelitian ini.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipakai peneliti yakni melakukan wawancara secara mendalam (*depth interview*) dimana peneliti mengambil informan yang sesuai dengan penelitian dan bertanya kepada informan serangkaian pertanyaan untuk mendapatkan perspektif mereka tentang topik penelitian sebagai informan kunci, atau sumber informasi. Teknik wawancara mendalam pada informan digunakan dalam menghimpun data (*depth interview*) di mana di sini pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang berperan sebagai informan.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam kegiatan analisis data terdiri dari penghimpunan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dikerjakan untuk mengumpulkan data melalui *interview*, observasi, serta dokumentasi.

2. Reduksi Data

Peneliti melakukan penyederhanaan, abstraksi, melalui catatan tertulis yang ditemui pada lapangan.

3. Penyajian Data

Peneliti menyusun informasi dengan terorganisir untuk memudahkan untuk memaknai data yang didasarkan pada pemahaman sebagai bahan untuk penarikan kesimpulan.

1.10.8 Penarikan Kesimpulan

Sebelum menarik kesimpulan, peneliti meninjau ulang catatan-catatan di lapangan untuk menguji validitas. Apabila kemudian tidak ditemukan masalah dalam informasi mengenai kasus yang diteliti, peneliti bisa menarik kesimpulan.

1.10.9 Kualitas Data

Pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan triangulasi dimana peneliti memeriksa legalitas data dengan mengambil data lain di luar dari data utama untuk mengecek dan juga sebagai komparasi data. Triangulasi yang dipakai pada penelitian ini memakai triangulasi sumber yang mana peneliti mengkomparasi kualitas informasi yang didapat melalui sumber yang berbeda.